

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

Penelusuran *Fly Paper Effect* pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Ari Junaedi^{1*}, Gregorius N. Masdjojo²

^{1,2}Pasca Sarjana, Universitas Stikubank Semarang

*ari.june@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: february 8, 2022

Received in revised form:
february 22, 2022

Accepted: february 22, 2022

Keywords:

capitall expenditure, DAU, Fly
paper Effects, locally-generated
revenue, operational
expenditure, The balancing fund

ABSTRACT

This research examine the flypaper effects as one as the indicator of succes of decentralisations. The research analyze to find out wether Balancing Fund (especially General Fund Transfer) and The locally-generated revenue influence the Operational Expenditure and Capital Expenditure in the period of 2018-2020. The resources of data used are budget realization report of 35 Regency/City Regional Government Province of Central Java that was published at the Directorate General of Financial Balance Ministry of Finance. The method used in this study is a purposive sampling method with panel data which is used the combination period/years of 2018-2020 time series data and used the cross section data of 35 Regency/City Regional Governments in Province of Central Java. The result of research prove that there has been a flypaper effect on the Balancing Fund (especially General Fund Transfer) on Operational Expenditures at 35 Regency/City Regional Government in Province of Central Java. The Balancing Fund and Locally Generated Revenue each have a significant influence on Operational Expenditures. The results of the second hypothesis testing prove that the The Balancing Fund and Locally Generated Revenue have no effect on Capitall Exspenditures.

PENDAHULUAN

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut supaya mampu membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. (Ardhani, 2011) mengungkapkan bahwa semakin baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal (Darwanto, 2007). Temuan ini dapat

mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Pada kenyataan yang ada, Pendapatan Asli Daerah menunjukkan prosentase yang masih kecil dibanding sumber-sumber pendapatan daerah yang lainnya. Sehingga keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD kurang berarti.

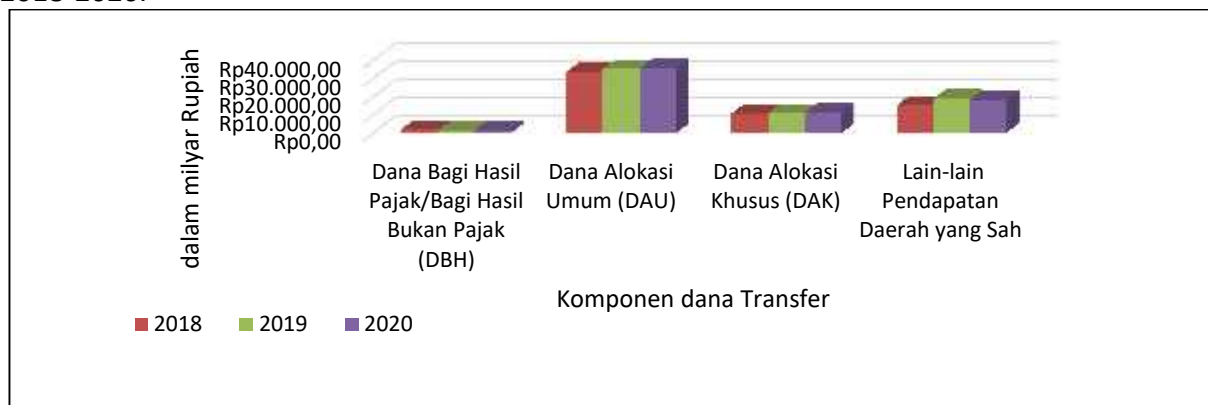
Pada Tabel 1. memberikan gambaran bahwa dana transfer sangat mendominasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persentase dana transfer berkisar 81,70% hingga 83,40% dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan presentase PAD berkisar antara 17,35 % hingga 18,30 %.

Tabel 1. Persentase Dana Transfer dan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Tahun	Kontribusi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
2018	83,40%	17,35%
2019	82,27%	17,73%
2020	81,70%	18,30%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021, diolah.

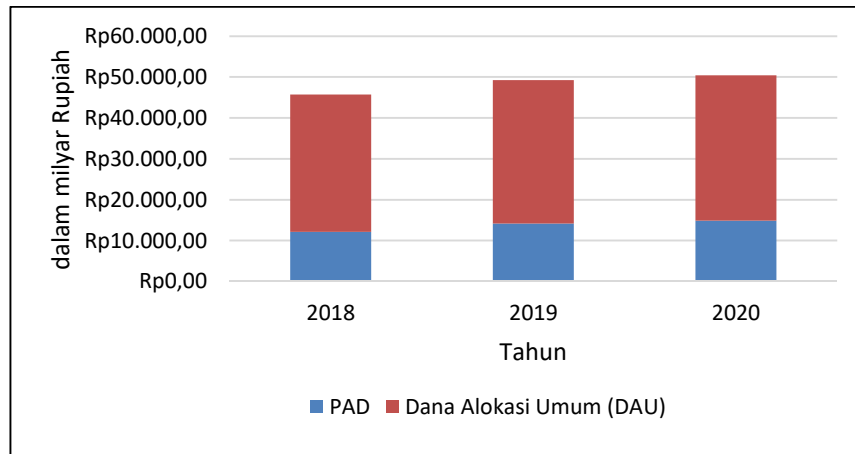
Dana transfer terdiri dari beberapa komponen, di antara komponen dana transfer yang paling dominan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. grafik perkembangan komponen dana transfer kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Komponen Dana Transfer Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Pada kenyataannya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun masih sangat kecil dan belum bisa memenuhi harapan, bahkan pertumbuhan PAD masih di bawah pertumbuhan DAU, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021, data diolah.

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan DAU dan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Disebutkan oleh (Oates W. E., 1999 dalam Abdullah et al, 2003) bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect*. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak) artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah).

Pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja pemerintah daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi Dana Alokasi Umum yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya dana Alokasi Umum diperoleh tetap porsi nominalnya. Menurut (Ndadari, 2008) proporsi Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahannya adalah apakah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah bebas dari masalah *Fly Paper Effect*? Rata-rata PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Persentase DAU dan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2020

Tahun	Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
2018	45,92%	16,60%
2019	43,73%	17,73%
2020	43,71%	18,30%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021, data diolah.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut di atas maka penelitian ini mengarah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaannya apakah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah bebas dari masalah *Fly Paper Effect*? Rata-rata PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Rata-rata PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2018 - 2020**

Tahun	Rata-rata PAD Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	Rata-rata PAD Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah
2018	Rp309.627.403.506	Rp526.472.134.000
2019	Rp365.163.823.090	Rp603.396.080.251
2020	Rp369.391.600.913	Rp693.516.109.946

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021, data diolah

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Otonomi Daerah

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi lain menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi (Suparmoko, 2002).

Pemberian kewenangan otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya daerah itu sendiri. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor jalannya pemerintahan daerah (Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, 2004b).

Manajemen Keuangan Daerah

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh sebab itu pembahasan manajemen keuangan daerah bertitik tolak dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka (Halim, 2004b).

Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, (Halim, 2004a) menyatakan bahwa persoalan yang paling dasar dalam manajemen keuangan suatu organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi publik, adalah bagaimana organisasi tersebut mencari dana (uang) dan bagaimana pula mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut. Dalam Manajemen Keuangan Daerah menurut (Mardiasmo, 2002) persoalan itu secara garis besar diekspresikan dengan Manajemen Penerimaan (sering pula digunakan istilah Pendapatan) dan Manajemen Pengeluaran (sering pula digunakan istilah Belanja). Kedua persoalan manajemen tersebut adalah persoalan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembicaraan APBD dan

pembahasan persoalan manajemen keuangan daerah bertitik tolak pada pembahasan APBD, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka (Yunasman, 2002 dalam Halim, 2004a).

Keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam APBD adalah uang milik publik (*public money*). Oleh sebab itu, manajemen keuangan daerah (*Local Government Financial Management*), merupakan bagian dari manajemen keuangan publik (*Public Financial Management*). Manajemen keuangan daerah (APBD) akan menyangkut persoalan akuntansi, anggaran, kendali, dan audit. Karena transaksi keuangan pada organisasi pemerintah daerah adalah transaksi APBD, maka dari aspek *historical transactions* akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi yang melaporkan pelaksanaan APBD. Dari *aspek future plans and expectations* jelaslah akuntansi keuangan daerah bersifat membantu menyediakan informasi pembuatan keputusan perencanaan anggaran daerah (APBD). Aktivitas pelaksanaan APBD jelas menyangkut aspek ekonomi dan keuangan. Jadi, akuntansi keuangan daerah erat dengan keputusan-keputusan ekonomi yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Teori Flypaper Effect

Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana Perimbangan adalah untuk mengurangi (bila tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Hines, 1995 dalam Lambut & Wokas., 2013).

Inman (2008) dalam Lambut, et al (2013), justru berpendapat bahwa keputusan dalam menetapkan pengeluaran belanja dana transfer adalah masalah politik daripada anomali. *Flypaper effect* sangat terlihat jelas sebagai hasil politisasi dan dihubungkan dengan insentif bagi mereka yang dipilih publik. Model birokratik meneliti *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatas informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Penelitian Legrenzi et.al. (2001) dalam Prakosa (2004), juga membuktikan bukti empiris tentang adanya *flypaper-effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa *local goverments consistently increase their expenditure more with respect to increase in state transfer rather than to increase in own revenues*. Zampeli (1986) dalam Prakosa (2004), memberikan bukti senada untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadi *flypaper-effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*. Karena itu menurut Hines et al (1995) dalam Prakosa (2004) *flypaper-effect* dipandang sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula.

Pemberian transfer berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan *flypaper effect* yang mengandung pengertian: (1) terjadinya peningkatan pajak dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, (2) elastisitas

pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap pajak daerah (Melo, 2002 dan Venter, 2007 dalam Rokhaniyah et al, 2011).

Namun berdasarkan tulisan Darby et al (2004) definisi *Flypaper Effect* dapat pula dijelaskan berdasarkan elastisitas atau tingkat responsif prosentase perubahan pada pengeluaran pemerintah karena perubahan dana transfer dari pusat. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dalam tesis ini ditawarkan konsep lain berkaitan dengan terjadinya *flypaper effect*, dengan melihat responsif pengeluaran pemerintah daerah terhadap perubahan transfer dari pemerintah pusat. Apabila koefisien transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*) lebih dari 1, maka terjadi *flypaper effect*. Namun apabila kurang atau sama dengan 1, maka tidak terjadi *flypaper effect*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik, maka semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Selisih lebih antara pendapatan dan belanja (Surplus) dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR (Kawedar, 2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ghazali et al (2008), dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Adisasmita, 2011).

Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Halim, 2004b).

Belanja Daerah (BD)

Menurut Mahmudi (2010), dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, beliau menyatakan bahwa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah (BD) dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja Operasi (BO)

Menurut Ghozali et al (2008), dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010), dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga Belanja Operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (*recurrent*).

Belanja Modal (BM)

Menurut Ghozali, et al (2008), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pengeluaran Belanja Modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu Belanja Modal tidak bersifat rutin. Belanja Modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah (Mahmudi, 2010).

Transfer (Grants)

Transfer atau *grants* dari pemerintah pusat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni *matching grants* dan *non matching grants*. Kedua *grant* tersebut digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur daerah dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja pelayanan publik dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) (Abdullah, 2003).

Kajian Penelitian Terdahulu

Adventinus Kristanto Lambut, et al (2013) meneliti tentang “Analisis *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”. Dengan metode regresi berganda (*multiple regression*) menyimpulkan bahwa pada 5 (lima) pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan terjadi *Flypaper effect* dalam kurun waktu realisasi anggaran 2006-2010.

Afrizawati (2012) meneliti tentang “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”. Dengan metode estimasi regresi berganda menemukan bahwa, terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Siti Rokhaniyah, et al (2011) meneliti tentang “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Tahun 2006-2008”. Dengan metode regresi data panel menyimpulkan tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa karena respon PAD terhadap Belanja Daerah lebih cepat dari pada respon DAU terhadap Belanja Daerah.

Kesit Bambang Prakosa (2004) meneliti tentang “ Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi

Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) “. Dengan metode estimasi regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) menemukan telah terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD.

Unun Dian Anggraeni, et al (2010) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah”. Dengan metode regresi sederhana dan berganda menyimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Pemda lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Pemda.

Hartati (2009) melakukan penelitian tentang “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah”. Dengan metode estimasi regresi berganda (*multiple regression*) dan regresi sederhana (*simple regression*) menyimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Kemudian menemukan pula bahwa penentuan besarnya belanja daerah tidak diukur berdasarkan potensi penerimaan daerah (PAD) yang didapat tetapi lebih kepada transfer (DAU) dari pusat. Perbedaan besarnya PAD Kabupaten/Kota berpengaruh pada *flypaper effect*. Dengan demikian *flypaper effect* berdampak pada penurunan kinerja keuangan daerah.

Pengembangan Hipotesis

Beberapa peneliti menemukan respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect* (Oates, 1999 dalam Abdullah et al, 2003).

Namun berdasarkan tulisan Darby et al (2004) definisi *Flypaper Effect* dapat pula dijelaskan berdasarkan elastisitas atau tingkat responsive prosentase perubahan pada pengeluaran pemerintah karena perubahan dana transfer dari pusat. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dalam tesis ini ditawarkan konsep lain berkaitan dengan terjadinya *flypaper effect*, dengan melihat responsif pengeluaran pemerintah daerah terhadap perubahan transfer dari pemerintah pusat. Apabila koefisien transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*) lebih dari 1, maka terjadi *flypaper effect*. Namun apabila kurang atau sama dengan 1, maka tidak terjadi *flypaper effect*.

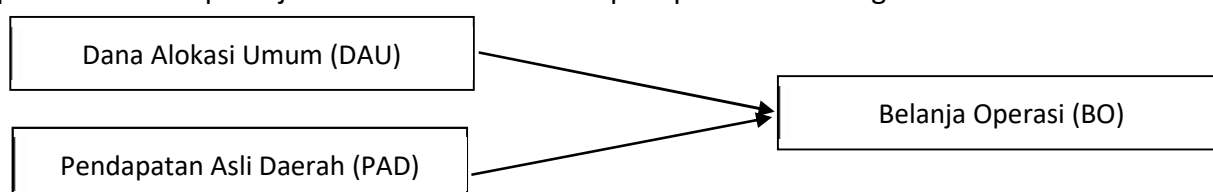
Maka hipotesis untuk menguji *flypaper effect* di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 ini adalah:

H1 : Apabila Responsif perubahan BO berlipat ganda terhadap perubahan DAU, maka terjadi *flypaper effect*.

H2 : Apabila Responsif perubahan BM berlipat ganda terhadap perubahan DAU, maka terjadi *flypaper effect*.

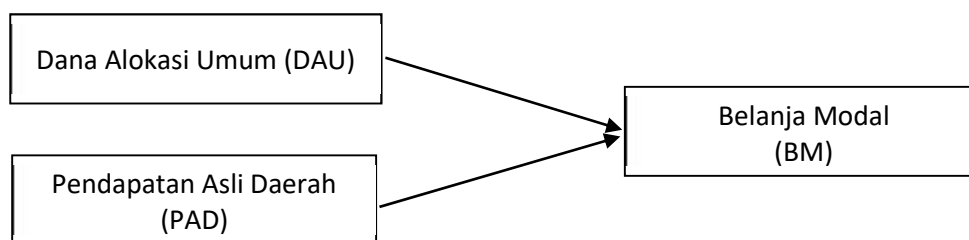
Model Empirik Penelitian

Secara teoritis pengaruh variabel dependen terhadap variable independen dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam model empiris penelitian sebagai berikut:



Gambar 3. Hubungan DAU, PAD dengan BO

H1: Apabila Responsif perubahan BO berlipat ganda terhadap perubahan DAU, maka terjadi *flypaper effect*.



Gambar 4. Hubungan DAU, PAD dengan BM

H2: Apabila Responsif perubahan BM berlipat ganda terhadap perubahan DAU, maka terjadi *flypaper effect*.

METODE PENELITIAN

Obyek, Populasi dan Sampel Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda data panel (*panel data regression*). Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis 1 dan 2 :

$$\text{LogBO}_t = \alpha + \beta_1 \text{LogDAU}_t + \beta_2 \text{LogPAD}_t + \text{eit} \quad (1)$$

$$\text{LogBM}_t = \alpha + \beta_1 \text{LogDAU}_t + \beta_2 \text{LogPAD}_t + \text{eit} \quad (2)$$

Dimana LogBO_t adalah logaritma Belanja Operasi dan LogBM_t adalah logaritma Belanja Modal, α konstanta, β_1 β_2 koefisien regresi, LogDAU_t adalah logaritma DAU, LogPAD_t adalah logaritma PAD, dan *e error term*.

Untuk mengestimasi model tersebut di atas menurut Gujarati (2006), akan menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model mana yang akan digunakan ditentukan oleh hasil uji Hausman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda Dan Uji Model

Berdasarkan hasil uji estimasi model (Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier) model persamaan regresi 1 (hipotesis 1) yang terbaik adalah *random effects model (REM)*. Seperti yang dijabarkan dalam tabel 3. Interpretasi model atas hasil uji model persamaan regresi 2 adalah sebagai berikut :

a. Uji F Statistik (Uji Signifikansi simultan)

Nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,00000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAU) dan variabel Pendapatan Daerah Asli (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Belanja Operasi (BO).

b. Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,880268 mengandung arti bahwa variabel Belanja Operasi (BO) dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar 88,02%, sedangkan sisanya ($100\% - 88,02\% = 11,98\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Regresi 1 *Random Effects Model (REM)*

Dependent Variable: LOG_BELANJA_OPERASI				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.258422	0.285788	-4.403340	0.0000
LOG_DANA_ALOKASI_UMUM	1.064886	0.047437	22.44838	0.0000
LOG_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH	0.127006	0.032885	3.862181	0.0002
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.056921	0.3334
Idiosyncratic random			0.080478	0.6666
Weighted Statistics				
R-squared	0.882571	Mean dependent var		4.293185
Adjusted R-squared	0.880268	S.D. dependent var		0.236825
S.E. of regression	0.081947	Sum squared resid		0.684957
F-statistic	383.3038	Durbin-Watson stat		2.732107
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Eviews 10

c. Uji Signifikansi Parsial

Nilai probabilitas Dana Alokasi Umum sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga menerima H_{a1} yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Operasi. Nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,0002 < 0,05$ sehingga menerima H_{a2} yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Operasi.

Hasil pengujian menunjukkan untuk Hipotesis 1 bahwa :

-) DAU t-statistik lebih besar dari t-tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.
-) PAD t-statistik lebih besar dari t-tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.

Koefisien DAU 1,064886 artinya kenaikan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Operasi sebesar 10,64%. Berdasarkan uraian konsep *Flypaper Effect*, apabila koefisien transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*) lebih dari 1, maka terjadi *flypaper effect* maka kondisi tersebut diatas mengindikasikan adanya *Flypaper Effect* terhadap Belanja Operasi.

Persamaan Regresi 2 (Hipotesis 2)

Berdasarkan hasil uji estimasi model (Uji Chow, Uji Hausman) model persamaan regresi 2 (hipotesis 2) yang terbaik adalah *fixed effects model (FEM)*. Seperti yang dijabarkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Regresi 2 Fixed Effects Model (FEM)

Dependent Variable: LOG_BELANJA_MODAL				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.232995	5.692231	1.622035	0.1094
LOG_DANA_ALOKASI_UMUM	-0.540054	0.967609	-0.558132	0.5786
LOG_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH	0.053525	0.245522	0.218004	0.8281
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.884604	Mean dependent var	5.841206	
Adjusted R-squared	0.823511	S.D. dependent var	0.419888	
S.E. of regression	0.176397	Akaike info criterion	-0.361845	
Sum squared resid	2.115891	Schwarz criterion	0.573360	
Log likelihood	55.99689	Hannan-Quinn criter.	0.017118	
F-statistic	14.47981	Durbin-Watson stat	3.107084	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Interpretasi model atas hasil uji model persamaan regresi 2 adalah sebagai berikut :

a. Uji F Statistik (Uji Signifikansi simultan)

Nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,00000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAU) dan variabel Pendapatan Daerah Asli (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal (BM).

b. Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,823511 mengandung arti bahwa variabel Belanja Modal (BM) dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 82,35%, sedangkan sisanya ($100\% - 82,35\% = 17,65\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

c. Uji Signifikansi Parsial

Nilai probabilitas Dana Alokasi Umum sebesar $0,5786 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,8281 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian menunjukkan untuk Hipotesis 2 bahwa :

-) DAU t-statistik lebih kecil dari t-tabel dan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
-) PAD t-statistik lebih besar dari t-tabel dan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
-) Melihat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal yang tidak signifikan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi *Flypaper Effect* terhadap Belanja Modal.

Tingkat Responsif perubahan BO terhadap perubahan DAU

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Eviews 10 diperoleh estimasi sebagai berikut :

$$\text{LogY}_{it} = -1,258422 + 1,064886 \text{ LogDAU}_{it} + 0,127006 \text{ Log PAD}_{it}$$

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi dan koefisiennya sebesar 1,064886 artinya apabila Dana Alokasi Umum pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik maka akan menaikkan Belanja Operasi pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Juga berarti DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Operasi 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi besaran DAU maka Belanja Operasi akan semakin tinggi pula.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi dan koefisiennya sebesar 0,127006 artinya apabila PAD 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik, maka akan menaikkan Belanja Operasi 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Operasi 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi besaran PAD maka Belanja Operasi akan semakin tinggi pula.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah disajikan, Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endah P et al (2014), Lambut et al (2013), Afrizawati (2012), Anggraeni et al (2010), Hartati (2009) dan Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rokhaniyah et al (2011).

Tingkat Responsif perubahan BM terhadap perubahan DAU

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Eviews 10 diperoleh estimasi sebagai berikut :

$$\text{LogY}_{it} = 9,232995 - 0,540054 \text{ Log DAU}_{it} + 0,053525 \text{ LogPAD}_{it}$$

Dari hasil estimasi di atas dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan koefisiennya sebesar $-0,540054$. PAD mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Koefisiennya sebesar 0,053525. Berarti DAU dan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah disajikan, tampak bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, maka dapat disimpulkan tidak terjadi *Flypaper Effect* terhadap Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endah et al (2015) dan penelitian Rokhaniyah et al (2011) yang menyatakan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Lambut et al (2013), Afrizawati (2012), Anggraeni et al (2010), Hartati (2009) dan Prakosa (2004).

Interpretasi Estimasi *Random Effect Model* (REM)

Persamaan Regresi 1

Dari hasil estimasi Persamaan Regresi 1 dengan menggunakan *Random Effect Model*, diperoleh koefisien *Random Effect* yang berbeda antar 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020 dengan hasil pada table 5.

Tabel 5. Konstanta *Random Effect Model* (REM) Persamaan Regresi 1

Dependent Variable: BELANJA_OPERASI				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-84.14822	39.29346	-2.141532	0.0346
DANA_ALOKASI_UMUM	0.915037	0.041092	22.26811	0.0000
PENDAPATAN_ASLI_DAERAH	0.299864	0.032237	9.301936	0.0000
Random Effects (Cross)				
_BANJARNEGARA--C	-0.241884			
_BANYUMAS--C	11.22250			
_BATANG--C	25.71893			
_BLORA--C	1.172855			
_BOYOLALI--C	11.04461			
_BREBES--C	-57.04496			
_CILACAP--C	-24.69057			
_DEMAK--C	-2.771578			
_GROBOGAN--C	-12.42094			
_JEPARA--C	-10.85229			
_KARANGANYAR--C	67.09732			
_KEBUMEN--C	17.16260			
_KENDAL--C	41.80833			
_KLATEN--C	10.50828			
_KUDUS--C	2.502075			
_MAGELANG--C	-27.23939			
_PATI--C	6.456454			
_PEKALONGAN--C	-33.04144			
_PEMALANG--C	-21.63728			
_PURBALINGGA--C	1.835744			
_PURWOREJO--C	-41.64627			
_REMBANG--C	1.966466			
_SEMARANG--C	8.587815			
_SRAGEN--C	10.49850			
_SUKOHARJO--C	27.42186			
_TEGAL--C	-4.785479			
_TEMANGGUNG--C	9.434324			
_WONOGIRI--C	38.17023			
_WONOSOBO--C	7.030363			
_KOTAMAGELANG--C	-36.92808			
_KOTAPEKALONGAN--C	-12.42988			
_KOTASALATIGA--C	-2.458132			
_KOTASEMARANG--C	10.28190			
_KOTASURAKARTA--C	-14.95024			
_KOTATEGAL--C	-6.782748			

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Dari table 5 di atas terlihat bahwa masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode Tahun 2018-2020 memiliki tingkat konstanta *random effect* yang berbeda. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel PAD dan DAU memiliki tingkat pengaruh yang berbeda terhadap Belanja Operasi pada tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2020.

Apabila nilai konstanta *random effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode Tahun 2018-2020 tersebut menunjukkan nilai positif, maka setiap perubahan pada DAU dan PAD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Operasi mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar konstanta *random effect*nya. Dan sebaliknya apabila menunjukkan nilai negatif, maka setiap perubahan pada DAU dan PAD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Operasi mengalami penurunan pertumbuhan sebesar konstanta *random effect*nya.

Nilai konstanta *random effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang paling tinggi adalah Kabupaten Karanganyar yaitu senilai 67,09732 artinya jika terdapat perubahan 1% pada DAU dan PAD, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Operasi sebesar 67,09%. Nilai konstanta *random effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang paling rendah adalah Kabupaten Brebes yaitu senilai -57,04496 artinya jika terdapat perubahan 1% pada DAU dan PAD, maka Pemerintah Kabupaten Brebes akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Operasi sebesar -57,04%.

Persamaan Regresi 2

Dari hasil estimasi Persamaan Regresi 2 dengan menggunakan *Random Effect Model*, diperoleh koefisien *Random Effect* yang berbeda antar 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 6. Konstanta *Random Effect Model* (REM) Persamaan Regresi 2

Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.946591	49.87465	0.199432	0.8423
DANA_ALOKASI_UMUM	0.229168	0.052184	4.391550	0.0000
PENDAPATAN_ASLI_DAERAH	0.359548	0.040439	8.891196	0.0000
Random Effects (Cross)				
_BANJARNEGARA--C	54.25003			
_BANYUMAS--C	-45.63213			
_BATANG--C	-62.53199			
_BLORA--C	97.29627			
_BOYOLALI--C	78.21774			
_BREBES--C	39.68522			
_CILACAP--C	87.71480			
_DEMAK--C	-3.603528			
_GROBOGAN--C	6.653914			
_JEPARA--C	-21.98352			
_KARANGANYAR--C	-79.55894			
_KEBUMEN--C	-37.61449			
_KENDAL--C	-54.51517			
_KLATEN--C	-69.47212			
_KUDUS--C	-12.49855			
_MAGELANG--C	37.48906			
_PATI--C	-50.44071			
_PEKALONGAN--C	18.80693			
_PEMALANG--C	-25.25459			
_PURBALINGGA--C	-29.54505			
_PURWOREJO--C	-4.887656			
_REMBANG--C	-17.21845			
_SEMARANG--C	-27.69502			
_SRAGEN--C	-30.12685			
_SUKOHARJO--C	18.26018			
_TEGAL--C	9.351592			
_TEMANGGUNG--C	-52.00875			
_WONOGIRI--C	16.57705			
_WONOSOBO--C	51.87627			
_KOTAMAGELANG--C	11.89712			
_KOTAPEKALONGAN--C	-1.758476			
_KOTASALATIGA--C	-9.298123			

_KOTASEMARANG--C	110.8570
_KOTASURAKARTA--C	41.65051
_KOTATEGAL--C	-44.93964

Sumber : Hasil Output Eviews 10

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode Tahun 2018-2020 memiliki tingkat konstanta *random effect* yang berbeda. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel PAD dan DAU memiliki tingkat pengaruh yang berbeda terhadap Belanja Modal pada tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2020.

Apabila nilai konstanta *random effect pada* Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode Tahun 2018-2020 tersebut menunjukkan nilai positif, maka setiap perubahan pada DAU dan PAD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Modal mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar konstanta *random effectnya*.

Dan sebaliknya apabila nilai konstanta *random effect pada* Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode Tahun 2018-2020 tersebut menunjukkan nilai negatif, maka setiap perubahan pada DAU dan PAD pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Modal mengalami penurunan pertumbuhan sebesar konstanta *random effectnya*.

Nilai konstanta *random effect* pada 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar (20 kabupaten/kota) bernilai negatif, yang artinya jika terdapat perubahan pada DAU dan PAD tidak terjadi pengaruh peningkatan Belanja Modal, dan ada sebagian kecil bernilai positif.

Nilai konstanta yang paling tinggi adalah Kota Semarang yaitu senilai 110,8570 artinya jika terdapat perubahan 1% pada DAU dan PAD, maka Pemerintah Kota Semarang akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Operasi sebesar 110,85%.

Nilai konstanta *random effect pada* Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang paling rendah adalah Kabupaten Karanganyar yaitu senilai -79,55894 artinya jika terdapat perubahan 1% pada DAU dan PAD, maka Pemerintah Kabupaten Brebes akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Belanja Operasi sebesar -79,55%.

SIMPULAN

1. Hasil Pengujian hipotesis pertama yang tujuannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *flypaper effect* terhadap Belanja Operasi, diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Operasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi.
2. Hasil Pengujian hipotesis kedua yang tujuannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *flypaper effect* terhadap Belanja Modal, ditolak. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap ada perubahan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan menambah Belanja Operasi belum memprioritaskan untuk mengalokasikan penambahan Belanja Modal.

4. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja operasi (belanja pegawai serta belanja barang dan jasa). Belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kotamadya hanya sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang di kisaran 25%.
5. Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan beban bagi daerah. Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Kedepan diharapkan lebih banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang dapat memenuhi kewajiban tersebut agar pembangunan infrastruktur di daerah lebih baik lagi dan mampu memberikan dampak *multiplier effect* utamanya untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta. Hal 1140-1159.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizawati. (2012). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS) Vol. 2, No. 1.
- Anggraeni, Unun Dian dan Yohanes Suhardjo. (2010). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. SOLUSI. Vol. 9 No. 1.
- Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan EViews. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darby, Julia; Anton Muscatelli and Graeme Roy. (2004). *Fiscal Federalism, Fiscal Consolidations and Cuts in Central Government Grants : Evidence from an Event Study. Working Paper*, 1-29. 14 March 2004.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar 26 - 28 Juli 2007.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). LGF Realisasi APBD TA 2018-2020_SAP_Permendagri. <http://www.djpk.depkeu.go.id/> diakses pada 1 Desember 2021.

- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. (2008). Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2006). Ekonometrika Dasar. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. (2001). Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16.
- Halim, Abdul. (2004a). Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2004b). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hartati. (2009). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak dipublikasikan.
- Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia (2004) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1999, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia (2006) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Indonesia (2019) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kawedar, Warsito; Abdul Rohman dan Sri Handayani. (2008). Akuntansi Sektor Publik buku 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2008). Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Haryo. (2004). Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Vol. 9, No.1.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusumadewi, A. Diah, & Rahman. (2007). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. JAAI Vol. 11, No. 1.

- Lambut, Adventinus Kristanto; Sifrid S Pangemanan dan Heinze Wokas. (2013). Analisis *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol. 4, No. 1.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). Serial Otonomi Daerah : Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Khusus. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nachrowi D & Hardius Usman. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ndadari, Adi. (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. 2nd Konferensi UKWMS. Surabaya 6 September 2008.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8, No. 2.
- Rinaldi, Udin. (2012). Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS Vol. 8, No. 2.
- Rokhaniyah, Siti & Muh Rudi Nugroho. (2011). Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008. 100 Fokus Ekonomi (FE). Vol.10, No. 2.
- Sidik, Machfud; B. Raksaka Mahi; Robert Simanjutak & Bambang Brodjonegoro. (2002). Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Buku Kompas.
- Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Tresch, Richard. (2002). *Finance Public Anormative Theory. Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.*
- Winarno, Wing Wahyu. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.